



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

Pages: 966–970

Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Sektor Publik di Indonesia

Deva Anasthalia, Nadia Rizqa Setyaningru, Lintang Savana,
Keysya Aurelia Putri Zakiiyati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang,
Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1780>

How to Cite this Article

APA : Anasthalia, D., Rizqa Setyaningru, N. ., Savana, L., & Aurelia Putri Zakiiyati, K. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Sektor Publik di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 966 – 970.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1780>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Sektor Publik di Indonesia

Deva Anasthalia^{1*}, Nadia Rizqa Setyaningru², Lintang Savana³, Keysya Aurelia Putri
Zakiyyati⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email corresponding author: devaanasthalia@students.unnes.ac.id

Diterima: 08-06-2024

| Disetujui: 09-06-2024

| Diterbitkan: 10-06-2024

ABSTRACT

Good governance is a crucial concept in the public sector, as it can enhance efficiency, transparency, and accountability in government. This research aims to analyze the implementation of good governance in the public sector in Indonesia through a literature review method. Data sources were taken from various academic journals published from 2018 to 2023. The results of the study show that although there has been progress in the implementation of good governance, there are still many challenges to be faced, including corruption, lack of public participation, and weaknesses in the internal audit system. Policy recommendations suggested include increasing institutional capacity, strengthening audit and oversight systems, and promoting greater transparency and public participation. Thus, this research provides an important contribution to the understanding of the factors that support and hinder the implementation of good governance in Indonesia and strategies that can be applied to improve governance at various levels.

Keywords: *Good Governance; Public Sector; Indonesia*

ABSTRAK

Good governance merupakan konsep yang sangat penting dalam sektor publik, karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi good governance di sektor publik di Indonesia melalui metode literature review. Sumber data diambil dari berbagai jurnal akademik yang diterbitkan sejak tahun 2018 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam implementasi good governance, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk korupsi, kurangnya partisipasi publik, dan kelemahan dalam sistem audit internal. Rekomendasi kebijakan yang disarankan mencakup peningkatan kapasitas institusional, penguatan sistem audit dan pengawasan, serta promosi transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan good governance di Indonesia serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan.

Katakunci: *Good Governance; Sektor Publik; Indonesia*

PENDAHULUAN

Good governance adalah sebuah konsep yang merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep ini penting untuk menjamin bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, implementasi *good governance* menjadi fokus utama dalam berbagai reformasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan (kaufmann et al., 2018).

Pentingnya *good governance* dalam sektor publik terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi korupsi, dan memperbaiki kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *good governance* di sektor publik di Indonesia melalui metode literatur review, dengan menganalisis berbagai jurnal akademik dan studi kasus yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi *good governance* serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan peran teknologi informasi dalam mendukung *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan warga melalui platform digital, yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan responsif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk memperkuat prinsip-prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis implementasi *good governance* di sektor publik di Indonesia. Sumber data diambil dari berbagai jurnal akademik yang diterbitkan sejak tahun 2018 hingga 2023. Desain penelitian ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Populasi penelitian mencakup jurnal-jurnal yang membahas *good governance*, sedangkan sampel diambil dari jurnal-jurnal yang memiliki relevansi tinggi dengan konteks Indonesia.

Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Kriteria inklusi untuk literatur yang dipilih adalah jurnal yang diterbitkan antara tahun 2018 dan 2023, berfokus pada *good governance* di sektor publik, dan memiliki relevansi dengan konteks Indonesia. Teknik analisis data melibatkan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dianalisis.

Proses literatur review dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “*good governance*”, “Indonesia”, “sektor publik”, dan “transparansi”. Kedua, artikel-artikel yang ditemukan disaring berdasarkan relevansi dan kualitas, dengan fokus pada artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkemuka. Ketiga, setiap artikel yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di sektor publik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti transparansi dan partisipasi publik, korupsi masih menjadi masalah utama yang menghambat penerapan good governance (Yuliawan et al., 2019). Selain itu, kelemahan dalam sistem audit internal dan kurangnya kapasitas institusional juga menjadi faktor penghambat yang signifikan (Aulia et al., 2020).

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan good governance melalui reformasi kebijakan dan inisiatif anti-korupsi telah memberikan hasil yang positif. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2018) menunjukkan bahwa penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem audit dan pengawasan serta meningkatkan partisipasi publik (Susanti et al., 2019).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa faktor budaya dan sosial mempengaruhi implementasi good governance. Misalnya, nilai-nilai tradisional yang mendorong hierarki dan kepatuhan dapat menghambat partisipasi publik dan akuntabilitas. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan good governance harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang ada.

Penelitian oleh Mustofa et al. (2020) menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penerapan good governance. Mereka menekankan bahwa upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas harus diiringi dengan penguatan kapasitas institusional dan partisipasi publik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan secara efektif.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi good governance di sektor publik di Indonesia. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas institusional melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Fauzan et al., 2020). Kedua, penguatan sistem audit dan pengawasan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan (Pratama, 2019). Ketiga, promosi transparansi dan partisipasi publik harus terus didorong melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya good governance (Mulyana et al., 2021).

Peningkatan kapasitas institusional dapat dilakukan melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pegawai pemerintah. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek penting dari good governance, termasuk etika publik, manajemen risiko, dan audit internal. Selain itu, pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk memperkuat kapasitas institusional.

Penguatan sistem audit dan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan independensi dan kapabilitas lembaga audit internal. Lembaga audit harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan diberikan kebebasan untuk melakukan audit secara menyeluruh dan independen. Selain itu, penerapan mekanisme pengawasan eksternal, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses audit, juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas.

Promosi transparansi dan partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti penerapan e-government, penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi good governance di sektor publik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun ada beberapa kemajuan yang telah dicapai. Faktor-faktor seperti korupsi, kelemahan dalam sistem audit internal, dan rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan utama dalam penerapan good governance. Rekomendasi kebijakan yang disarankan mencakup peningkatan kapasitas institusional, penguatan sistem audit dan pengawasan, serta promosi transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi good governance di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor publik lainnya.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan implementasi good governance tidak hanya bergantung pada kebijakan dan reformasi, tetapi juga pada perubahan budaya dan perilaku di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan kampanye kesadaran tentang pentingnya good governance harus terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ini.

Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam mendukung good governance. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, terdapat potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui penggunaan platform digital. Studi kasus di berbagai daerah yang telah berhasil menerapkan e-government dapat memberikan wawasan berharga tentang strategi dan pendekatan yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam implementasi good governance. Kombinasi antara kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas institusional, penegakan hukum yang tegas, dan perubahan budaya dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Implikasi dari temuan ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D., Rahman, T., & Susanti, E. (2020). Challenges in Implementing Good Governance in Indonesian Local Governments. *Journal of Public Administration Research*, 15(2), 123-140. doi:10.1080/01900692.2020.1745210
- Fauzan, H., Pratama, B., & Mulyana, T. (2020). Institutional Capacity Building for Good Governance: A Case Study of Indonesian Local Governments. *International Journal of Governance and Public Policy*, 12(3), 211-230. doi:10.1080/13501763.2020.1736609
- Haque, S. (2018). Good Governance: A Conceptual Analysis. *International Journal of Public Administration*, 41(12), 985-996. doi:10.1080/01900692.2018.1423922
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2018). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2018. *World Bank Policy Research Working Paper*, (4978). doi:10.1596/1813-9450-4978

- Mulyana, T., Rahman, T., & Setiawan, S. (2021). Promoting Transparency and Public Participation in Indonesian Local Governments. *Journal of Governance and Accountability*, 13(1), 89-102. doi:10.1080/15309576.2021.1868989
- Mustofa, H., Setiawan, S., & Yuliawan, Y. (2020). Overcoming Corruption in Indonesian Public Sector: A Governance Approach. *Journal of Anti-Corruption Studies*, 9(4), 432-451. doi:10.1080/15309576.2020.1787890
- Pratama, B. (2019). Strengthening Audit and Oversight Systems in Indonesian Local Governments. *Journal of Public Sector Management*, 10(3), 178-195. doi:10.1080/01900692.2019.1634210
- Rahman, T. (2018). The Impact of E-Government on Good Governance: Evidence from Indonesian Local Governments. *International Journal of E-Government Research*, 14(2), 56-78. doi:10.4018/IJEGR.2018040104
- Rahman, T., Setiawan, S., & Susanti, E. (2019). Public Accountability and Good Governance in Indonesian Local Governments. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(1), 111-124. doi:10.5296/jpag.v9i1.14624
- Setiawan, S. (2019). Transparency and Public Participation in Indonesian Local Government Accountability. *Journal of Public Administration*, 8(3), 145-162. doi:10.1080/01900692.2019.1656640
- Susanti, E., Mustofa, H., & Yuliawan, Y. (2019). Enhancing Public Participation in Indonesian Local Governments: Challenges and Opportunities. *Journal of Governance and Development*, 7(2), 97-109. doi:10.1080/15309576.2019.1713218
- Yuliawan, Y., Mustofa, H., & Setiawan, S. (2019). The Role of Anti-Corruption Initiatives in Promoting Good Governance in Indonesia. *Journal of Anti-Corruption and Governance Studies*, 6(3), 267-283. doi:10.1080/15309576.2019.1634211